

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PT.BPRS HAJI MISKIN KABUPATEN
TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :



YANI KURNIAWAN
1210112166

Dosen pembimbing:

- 1. Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A.**
- 2. H. Rembrandt, S.H., M.Pd.**

Program kekhususan : Hukum Perdata Adat Dan Islam (PK III)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

No. Reg: 4697/PK-III/I/2017

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PT.BPRS HAJI MISKIN KABUPATEN
TANAH DATAR**

**(Yani Kurniawan, 1210112166, Hukum Perdata Adat dan Islam, PK III Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 2016, 68 Halaman)**

ABSTRAK

perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam rangka meyakini operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi prinsip syariah. pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin tentunya memerlukan pengawasan prinsip syariah yang baik pula untuk menjamin kegiatan operasional terus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Pada PT.BPRS Haji Miskin. Dan apa saja akibat hukum apabila operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji miskin Tidak sesuai dengan prinsip syariah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapat melalui penelitian kepustakaan dan penelitian dilokasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilakukan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ada dua poin utama yang diawasi oleh DPS yaitu pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru BPRS; dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. Pada pengawasan operasional yang dilakukan DPS BPRS Haji Miskin ditemukan transaksi perbankan yang melanggar prinsip syariah. Adapun pelanggaran itu tidak mendapat sanksi dari OJK karena hanya pelanggaran kecil saja yang dapat langsung ditangani dan diperbaiki oleh BPRS.